



Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Julie Abdullah¹, Wahyudin Hasan²

^{1,2}Universitas Gorontalo, Jl. A. A Wahab, Kecamatan Limboto, Kabupaten
Gorontalo/Indonesia

julieabdullah99@gmail.com¹, wahyudinhasan99@gmail.com²

Citation: Abdullah, J. & Hasan, W. (2022). Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 208–213. DOI: [10.32662/gaj.v5i2.2414](https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2414)

Artikel info

Artikel history:

Received: 29-08-2022

Revised: 26-09-2022

Accepted: 27-09-2022

Abstract. *The purpose of writing this article is to determine the level of regional financial dependence in the North Bolaang Mongondow Regency using the method of financial ratio analysis. The results showed that over 5 years the government of North Bolaang Mongondow Regency relied heavily on transfer funds from external parties to finance regional expenditures with an average percentage of financial dependence of 93.29 percent. This high percentage rate shows that the contribution of local original income to the total regional income of the North Bolaang Mongondow Regency is still minimal.*

Abstrak. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat bergantung pada dana transfer dari pihak eksternal untuk membiayai pengeluaran daerah dengan persentasi ketergantungan keuangan rata-rata 93,29 persen. Tingginya angka persentasi ini menunjukkan bahwa masih minimnya sumbangsih pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Keywords:

Regional Finance;

Financial

Addiction

Corresponden author:

Email: julieabdullah99@gmail.com

Pendahuluan

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah yang lebih luas, maka daerah membutuhkan pula dukungan sumber pendanaan yang lebih baik agar tercapai keberhasilan otonomi daerah. Namun diketahui bersama bahwa sumber pendanaan berupa pendapatan asli daerah dengan daerah lain itu berbeda-beda. Setiap Daerah diberikan hak memungut pajak dan retribusi, hak mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional berupa dana perimbangan, hak mengelola kekayaan dan sumber pendapatan lainnya yang sah. Dengan diberikannya kewenangan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi hak dana perimbangan (Oki et al., 2020). Lebih lanjut (Mardiasmo, 2021) menjelaskan bahwa dengan diberikannya kewenangan otonomi ini

diharapkan pemerintah daerah bisa mengelola serta menggali potensi sumber daya daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik. Konsekuensi dari adanya otonomi yakni pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan agar mampu memberikan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Keberhasilan daerah didalam menyelenggarakan otonomi daerah ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan (Susilawati et al., 2018).

Kondisi inilah yang terus mendorong perlu adanya riset tentang pengukuran setiap kinerja keuangan penyelenggara anggaran yang telah diberikan amanat oleh undang-undang dalam menjalankan otonomi daerah. Dalam mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja yang dihasilkan, maka peranan dari setiap data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk membantu mengidentifikasi sumber pembiayaan daerah serta besaran belanja yang harus dikeluarkan oleh daerah agar perencanaan keuangan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah. Daerah yang telah mampu dalam mendanai belanja daerah dari kemampuan sendiri dengan menggali serta mengelola pembiayaan internal daerah bisa dikatakan telah mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah bisa dikatakan mandiri bisa di lihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan oleh daerah yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya dilihat menjadi salah satu ukuran dalam mengukur ketergantungan akan suatu daerah kepemerintah pusat. Hal ini didasarkan atas prinsip kemandirian daerah bahwa semakin besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka semakin kecil pula ketergantungan suatu daerah tersebut terhadap pemerintah pusat.

Penelitian mengenai ketergantungan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat amanah undang-undang telah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerah sesuai kebutuhan dan prioritasnya masing-masing (Bisma & Susanto, 2010). Bahkan (Salazar & Mollick, 2006) mengemukakan bahwa aspek ketergantungan financial sangat penting untuk dipelajari. (Haryanto, 2017) bahkan telah melakukan penelitian dan menemukan bahwa ada sekitar 15 atau 47% daerah di Indonesia rasio ketergantungan keuangan sangat besar ditandai dengan angka rasio sekitar 76-100. Artinya ketergantungan fiskal daerah terhadap bantuan pusat sangat besar serta kinerja anggarannya sangat buruk. (Harahap, 2020) menganalisis ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Secara rata-rata sebesar 94,03%, sehingga diklasifikasikan sangat tinggi. Ini menunjukkan jika peran pemerintah pusat maupun Provinsi masih sangat mendominasi dalam membantu keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang dimekarkan pada tahun 2006. Adapun selama tahun 2020 diketahui PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak pernah beranjak dari 1,59% dan cenderung stagnan dari tahun-tahun sebelumnya (BPKAD, Bolmut 2020). Pendapatan yang ada di daerah Bolaang Mongondow Utara tidak sebanding dengan belanja daerah atau belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah sehingga belum mampu secara keuangan untuk membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerahnya. Dari uraian mengenai kondisi tersebut maka diperlukan suatu kajian untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan daerah yang menjadi salah satu tolak ukur atau ukuran dalam penilaian kinerja keuangan

daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuantitatif dan dianalisis data menggunakan rasio ketergantungan keuangan daerah. Berikut ini rumus rasio KKD:

$$\text{KKD} : \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

Sumber : Kamaroellah, (2017)

Keterangan :

KKD : Ketergantungan Keuangan Daerah

PT : Pendapatan Transfer

TPD : Total Pendapatan Daerah

Tabel 1. Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

%	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam (Bisma & Susanto, 2010)

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berikut ini data laporan pendapatan transfer dan total pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara :

Tabel 2 Laporan Realisasi Anggaran untuk Total Pendapatan dan Pendapatan Transfer Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan
2016	550.562.795.002	640.722.162.032
2017	653.612.188.941	679.933.798.492
2018	666.431.814.320	694.013.341.302
2019	633.110.020.750	671.502.937.484
2020	614.624.803.329	653.355.625.235

Sumber : Data olahan, 2021

Berdasarkan data tabel 2, maka dilakukan analisis perhitungan menggunakan rasio KKD adalah sebagai berikut :

Tahun 2016

$$\text{KKD} : \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

$$\text{KKD} = \frac{550.562.795.002}{640.722.162.032} \times 100\%$$

Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2016 = 85,93%

Tahun 2017

$$\text{KKD} : \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

$$\text{KKD} = \frac{653.612.188.941}{679.933.798.492} \times 100\%$$

Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2017 = 96,13%

Tahun 2018

$$\text{KKD} : \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

$$\text{KKD} = \frac{666.431.814.320}{694.013.341.302} \times 100\%$$

Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2018 = 96,03%

Tahun 2019

$$\text{KKD} : \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

$$\text{KKD} = \frac{633.110.020.750}{671.502.937.484} \times 100\%$$

Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) Tahun 2019 = 94,28%

Tahun 2020

$$\text{KKD} : \frac{PT}{TPD} \times 100\%$$

$$\text{KKD} = \frac{614.624.803.329}{653.355.625.235} \times 100\%$$

Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) 2020 = 94,07%

Pembahasan

Dalam melaksanakan otonomi daerah, salah satu ciri utama keberhasilan daerah mampu menjalankannya yakni dilihat dari kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat kinerja keuangan berdasarkan rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (KKD) sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Analisis Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Persentase (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
2016	85,93	Sangat Tinggi
2017	96,13	Sangat Tinggi
2018	96,03	Sangat Tinggi
2019	94,28	Sangat Tinggi
2020	94,07	Sangat Tinggi
Rata-rata	93,29	Sangat Tinggi

Sumber : Data olahan, 2021

Tabel 3 yang merupakan persentasi tingkat ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sehingga dapat dilihat pada tahun 2016 ketergantungan keuangan daerah sebesar 85,93% yang artinya sangat tinggi, Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 96,13% serta tahun

2018 sebesar 96,03%, sementara di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 94,28% dan di tahun 2020 kembali turun sebesar 94,07% namun ketergantungan keuangan masih tinggi. Selama lima tahun sangat nampak bahwa pemerintah masih sangat bergantung dengan dana transfer pemerintah pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan rata-rata persentasi ketergantungan sangat tinggi mencapai 93,29%.

Permasalahan tingginya angka persentasi ketergantungan disebabkan belum optimalnya daerah dalam menggali potensi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan belum maksimalnya kemampuan SDM dalam mengelola potensi daerah sehingga menyebabkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer serta dipengaruhi oleh masih rendahnya sumbangsiah PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap total pendapatan daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Kamaroellah, 2017) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan masih tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan dari analisis hasil penelitian dan diskusi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Ketergantungan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat tinggi dengan angka persentasi sebesar 93,29% dan hasil ini mengindikasikan bahwa hampir keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh dari pendapatan transfer. (2) Pemerintah belum maksimal dalam upaya memanfaatkan dan mengelola potensi daerah sehingga hal ini berdampak pada tingginya presentasi ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap pendapatan transfer.

Saran yang dapat diberikan adalah (1) Perlunya evaluasi kebijakan terkait pengoptimalan penggalian potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah serta perlu upaya percepatan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah. (2) Untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperluas variabel kinerja keuangan yang akan diteliti dan juga objek penelitian yang lebih luas agar dapat memberikan perbandingan kinerja keuangan.

Daftar Pustaka

- Agustina, O. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1(2), 1-10.
- Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 - 2007. *Ganec Swara*, 4(3), 75-86.
- Depdagri.1997.Kepmendagri No.690.900.327, 1996, Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Hafiz, A. T. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas. Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34-38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Haryanto, J. T. (2017). Mapping the Local Own Resources (PAD) Performance and Regional Dependence in Indonesia 2008-2014: Quadrant Method Approach. *Jurnal Bina Praja*, 9(1), 41-52. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.41-52>

- Ibarra Salazar, J., & Mollick, A. V. (2006). Mexican northern border municipalities, financial dependence and institutions. *Annals of Regional Science*, 40(4), 859–874. <https://doi.org/10.1007/s00168-005-0036-4>
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, M. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. Maulana.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Ekopem: Jurnal Ekonomi ...*, 5(2), 1–6. <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/584>
- Saprudin. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Accounting Journal*, 1(1), 47–58.
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Tuaputimain, Y. (2019). Flypaper Effect On The General Allocation Funds And Regional Revenue To Regional Expenditure. *Gorontalo Accounting Journal*, 2(2), 65–76.